

Judul : Menanti Ujung Cerita Kisruh Rp349 Triliun
Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Menanti Ujung Cerita Kisruh Rp 349 Triliun

Perbedaan data transaksi mencurigakan di Kemenkeu antara yang disampaikan Mahfud MD dan Sri Mulyani perlu diikuti aksi bersih-bersih, baik berupa penindakan maupun pembenahan tata kelolanya.

Saat rapat kerja dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023), anggota Komisi III DPR Hince Panjaitan menyebut polemik nilai transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan ibarat petir yang menyambar-nyambar. Kisruh itu memperlihatkan betapa pejabat publik dalam satu organisasi tidak senada suaranya. Publik pun dibuat kebingungan.

"Jangan sampai petir menyambar menggelegar di siang bolong, tetapi hujan tak turun. Kita ingin di sini hujan itu turun dan deras sehingga terbangkar ini semua," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Apa yang diungkapkan Hince itu seolah merefleksikan harapan publik. Sebab, sejak transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kemenkeu itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, publik disajikan keterangan yang berbeda oleh pimpinan lembaga pemerintahan ataupun negara. Baik yang disampaikan Mahfud, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustianandana, maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu tak ada yang senada.

Pada hal, Mahfud dan Sri Mulyani sama-sama tergabung di dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimejya Panjaitan dalam acara Satu Meja The Forum bertajuk "Transaksi Janggal Rp 349 T: Dana Siapa untuk Apa?" yang disiarkan di Kompas TV, Rabu (29/3) malam, mengatakan, kisruh perbedaan data transaksi mencurigakan yang berkaitan



dengan pegawai Kemenkeu belum tuntas. Selama rapat kerja (raker), anggota Komisi III mempertanyakan perbedaan data yang sangat signifikan itu.

Menurut Trimejya, saat raker dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyampaikan nominal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 3,3 triliun. Namun, dua hari setelahnya, Mahfud menyampaikan jumlah lebih besar, Rp 35,5 triliun.

"Mengapa datanya berbeda? Kepala PPATK menyebut ada temuan pegawai Kemenkeu terkait dengan lebih dari satu perusahaan. Perusahaan itu perusahaan cangkang yang kepemilikannya menggunakan nama istri, sopir, hingga tukang kebun," katanya.

Dalam acara yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanudjodjo itu, Trimejya juga mengatakan ada indikasi bahwa data yang disampaikan ke Sri Mulyani itu ada yang disembunyikan oleh bawahannya. Sri Mulyani tidak mendapatkan laporan utuh dari jajarannya. Jajaran Kemenkeu terindikasi hanya menyerahkan sebagian laporan hasil analisis (LHA) PPATK dan melaporkan transaksi mencurigakan lainnya sebagai laporan pajak. Aksesnya terhadap LHA itu ditutup sehingga menyebabkan kekeliruan pemahaman.

"Yang menarik, Pak Mahfud menyatakan datanya yang benar karena langsung dari PPATK. Makanya, rapat akan dilanjutkan dengan memanggil Menkeu," ujarnya.

Menyikapi transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007-2011 Mochammad Jasin yang turut hadir dalam acara bincang-bincang itu mengaku tidak kaaget. Sebab, pada 2008, KPK pernah melakukan inspeksi mendadak di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Hasilnya, selama tiga jam sidak, penyidik menemukan uang suap senilai Rp 500 juta. Kala itu, jumlah uang suap di Bea dan Cukai Jakarta diperkirakan mencapai Rp 47 miliar per bulan. Jika kemudian data Rp 349 triliun yang disampaikan PPATK adalah akumulasi sejak 2009 hingga 2023, dia menilainya wajar.

"Kami periksa di meja-meja ternyata ada amplop-amplop dari importir melalui ekspedisi. Mulai dari frontliner sudah melakukan itu. Tidak heran ada indikasi TPPU sebesar itu di Kemenkeu," katanya.

Jasin menyebut, setelah penindakan itu, KPK sudah melaporkan kepada Menkeu Sri Mulyani. KPK mengimbau kepada Kemenkeu untuk melakukan pembenahan tata kelola, khususnya di Bea dan Cukai.

Namun, melihat fenomena yang terjadi hari ini, Jasin meyakini pembenahan yang dilakukan belum menyentuh inti persoalan. Pembenahan lebih seperti aksi memadamkan api sehingga ketika pengawasan lemah, bisa kumat lagi. "Sekarang semakin pintar dan canggih cara memerasnya," ujarnya.

Pengamat politik Philips Vermonde, narasumber lain dalam acara itu, menyebut, duduk perkara transaksi janggal Rp 349 triliun harus diletakkan bahwa itu adalah dana masyarakat yang dialihkan dengan cara ilegal. Publik harus memahami



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi III DPR terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, Rabu (29/3/2023). Rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, itu turut dihadiri Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustianandana.

bahwa itu bukanlah uang Kemenkeu. Uang itu dialihkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memeras, kemudian disamarkan asal-usulnya.

"Apa yang disampaikan Pak Jasin tadi sudah 15 tahun lalu. Ini menyedihkan karena cara-cara kita mengangkur korupsi tidak berubah. Apalagi, sekarang modus-modus korupsi semakin canggih," tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Philips, temuan ini harus disikapi sebagai momentum untuk pemberantasan kejahatan di sektor keuangan. Paradigma pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Tak hanya pada

aktor penyelenggara negara, tetapi juga korporasi. Sebab, hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyebut dana ilegal dari kejahatan banyak yang mengalir untuk pendanaan pemilu. Patut diduga, dana itu juga mengalir ke politikus.

Momentum bersih-bersih

Sekretaris Transparency International Indonesia Danang Widoyoko dalam acara bincang-bincang itu pun menyampaikan agar perbedaan data antara PPATK dan Menkeu bisa dibuka secara terang benderang kepada publik. Publik berhak mengetahui duduk perkara transaksi mencurigakan senilai

Rp 349 triliun tersebut. Ke mana ujungnya transaksi mencurigakan itu? Jika ada kesulitan menindaklanjutinya, di mana letak kendalanya? Itu semua harus terjawab dalam rapat lanjutan di DPR.

"Untuk mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang memang menjadi penting untuk menghadirkan Undang-Undang Perampasan Aset ke depan," tegasnya.

Jasin pun berharap kasus ini jadi momentum bersih-bersih. Presiden Joko Widodo harus membenahi aspek pencegahan dengan restrukturisasi di Kemenkeu. Orang-orang yang terbukti terlibat dalam tindak pidana harus disingkirkan. Sete-

lah itu, penegakan hukum juga harus berjalan. Harus ada tindak lanjut dari ramai-ramai isu Rp 349 triliun ini.

Trimejya berjanji DPR akan mengawal data yang disampaikan Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus membongkar masalah itu. Jika dugaan itu terbukti, Kemenkeu harus memperbaiki tata kelolanya. Baik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK harus menindaklanjuti temuan itu.

Kiranya, harapan publik pun sama. Menginginkan pengusutan secara tuntas sebagai akhir cerita kisruh Rp 349 triliun ini, di tengah tren korupsi yang masih merajalela.

(DIAN DEWI PURNAMASARI)